

RINGKASAN

REGAS FEBRIA YUSPITA, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, *Public Governance* dalam Pengelolaan Pendidikan Berkeadilan Studi Kasus di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto, Komisi Pembimbing, Ketua : Prof. Dr. Paulus Israwan MS., M.S, Anggota Dr. Bambang Tri Harsanto, M.Si.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2009 ada 36 siswa titipan para pejabat di Kabupaten Banyumas, rendahnya kontrol komite sekolah terhadap pembangunan lahan parkir dan masjid, pembangunan berfokus pada pembangunan fisik, dan komite lebih berpihak pada kepentingan sekolah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peran komite sekolah baik sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah menciptakan *public governance* dalam pengelolaan pendidikan berkeadilan melalui strategi *co-production* di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto. Teori yang digunakan adalah teori *public governance* melalui strategi *co-production* yang terdiri atas empat tahapan yaitu pengkomisian bersama, perancangan bersama, penyampaian layanan bersama dan penilaian bersama. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto dengan metode kualitatif deskriptif studi kasus instrumental. Informan diambil dengan cara teknik *Purposive sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif dengan triangulasi sumber, yaitu 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2) membandingkan hasil wawancara dengan beberapa informan untuk menyamakan persepsi dan kesepadanan informasi; dan 3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

Hasil penelitian ini adalah belum terwujud adanya pengkomisian bersama, sehingga penyusunan prioritas, rencana, dan anggaran masih didasarkan atas kebutuhan sekolah bukan kebutuhan orang tua siswa. Perancangan kebijakan bersama belum terwujud karena masih minimnya keterlibatan para *stakeholder* dalam perancangan sehingga kebijakan yang dirancang pun tidak inovatif dan kreatif. Penyampaian layanan bersama belum terwujud, akibatnya penyampaian layanan tidak memuaskan bagi orang tua siswa dan siswa. Pemantauan bersama belum terwujud, karena pihak yang terlibat dalam pemantauan hanya pihak sekolah, komite terlibat pemantauan jika program sekolah tersebut dibuat bersama-sama mereka. Oleh karena itu, perlu diciptakan *public governance* dalam pengelolaan pendidikan di SMA Negeri 1 Purwokerto dan SMA Negeri 2 Purwokerto.

Kata kunci : *pengkomisian bersama, penilaian bersama, penyampaian bersama, perancangan bersama, public governance*

SUMMARY

REGAS FEBRIA YUSPITA, Study Program of Public Administration Science, Postgraduate Program, University of General Sudirman. Public Governance in Equitable Education Management Case Study at SMA 1 Purwokerto and SMA 2 Purwokerto. Supervising Committee, Chairman: Prof. Dr. Paulus Israwan MS, Member Dr. Bambang Tri Harsanto, M.Si.

The research problem in the year 2009 there were 36 students entrusted officials in Banyumas, low control of the school committee and mosque construction of parking lots, construction focused in physical development, and the committee is in favor of the interests of the school. These problems indicate that the school committee either as giver consideration, support, control and mediators are still low. The purpose of this research is to create public governance in the management of equitable education through co-production strategy in SMA 1 and SMA 2 Purwokerto. The theory used is the theory of public governance through co-production strategy which consists of four stages, namely joint commissioning, joint design, delivery of shared services and joint assessment. This study was implemented in SMA 1 Purwokerto and SMA Negeri 2 Purwokerto with descriptive qualitative method of instrumental case study. Informants were taken by means of purposive sampling technique. Analysis of the data used was Interactive data analysis with triangulation of sources, namely i) comparing the data observations with data from interviews; ii) comparing the results interviews with informants to equate perception and equivalence information; and iii) comparing the results of interviews with the contents of a documents.

The results of this study are not yet realized any co-commissioning, so the prioritization, planning, and budget are still based on school needs not the parents needs. Co-design had not materialized because they still lack the involvement of stakeholders in the design so that the policy was not designed innovative and creative. Co-delivery had not materialized, the delivery of services is not satisfactory to the parents and students. Co-assessment had not materialized, because the monitoring just involved the school, monitoring school committee was involved in monitoring if the program was made with them. Therefore, it is necessary to create public governance at SMA N 1 Purwokerto and SMA N 2 Purwokerto.

Keywords : *co-assessment, co-commissioning, co-delivery, co-design, public governance*